

## Analysis of Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Management in East Lombok District During and Post Covid-19

### Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur Selama dan Pasca Covid-19

Tasya Hilma Fadila<sup>\*1</sup>, Abdul Manan<sup>2</sup>, Eka Agustiani,<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia.

#### Article Info

**Submitted:**

12/12/2022

**Accepted:**

29/12/2022

**Approved:**

09/01/2023

**Published:**

11/01/2023

#### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat Efektivitas dan Efisiensi Keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada masa Covid-19 dan Pasca Covid-19. Data yang digunakan adalah data Sekunder yaitu data APBD Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2019-2021. teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2021 mencapai tingkat yang Efektif meskipun pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang stabilitas Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2019-2021 berada pada tingkat Kurang Efisien dan Tidak Efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan). Dalam Perekonomian dan keuangan hal ini merupakan kondisi yang Tidak Efisien terlebih lagi pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2020.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Keuangan Daerah.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the extent to which the level of Financial Effectiveness and Efficiency in the East Lombok Regency during the Covid-19 and Post-Covid-19 periods. The data used is Secondary data, namely East Lombok Regency APBD data in 2019-2021. The analysis technique used is to calculate the Regional Financial Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio. The results obtained show that overall, the average value of the effectiveness ratio for East Lombok Regency Regional Finance in 2019-2021 reached an effective level even during the Covid-19 Pandemic. This means that the local government of East Lombok Regency has succeeded in realizing Regional Original Income (PAD) from the previously estimated target so that the potential of existing PAD can be maximized by the local government to support economic stability in East Lombok Regency. Meanwhile, the level of Regional Financial Efficiency in East Lombok Regency in 2019-2021 is at the Less Efficient and Inefficient level. This means that the portion of input use (spending) is more than 90 percent compared to the amount of output (income). In terms of the economy and finance, this is an inefficient condition, especially during the 2019-2020 Covid-19 Pandemic.

**Keywords:** Effectiveness, Efficiency, Regional Finance

## PENDAHULUAN

Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan secara desentralisasi, yang artinya pemerintah pusat memberikan kuasa penuh kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri Desentralisasi merupakan

sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Namun untuk menghindari penyelewengan

\* Correspondence Address

E-mail: tasyahilmafadila@gmail.com

dan penyimpangan maka pengawasan oleh pemerintah pusat tetap dilaksanakan.

Keberhasilan suatu pemerintahan tidak terlepas dari cara suatu daerah dalam mengelola sumber daya termasuk ke dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kunci suatu daerah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Sitompul, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 menjelaskan semua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 meliputi kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kerugian daerah.

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki beberapa tahap diantaranya ada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan terakhir penanggungjawaban. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah ini dimulai dari perencanaan APBD. Penyusunan APBD dipertimbangkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 181 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 17-18 tentang Keuangan Negara (Latif, 2019).

APDB adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD. APBD memegang fungsi otorisasi dimana APBD merupakan sebuah acuan dalam mengelola anggaran yang mana anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan dan belanja. APBD memegang fungsi perencanaan yang artinya bahwa anggaran merupakan pedoman penyusunan

rencana kegiatan pada tahun yang bersangkutan. APBD memegang fungsi pengawasan sehingga APBD merupakan tolak ukur dalam menilai pelaksanaan program yang direncanakan. APBD memegang fungsi alokasi yang artinya pengalokasian APBD tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah. APBD memegang fungsi distribusi yang mana dalam pengalokasian dana, APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan keparuhan. Dan yang terakhir APBD memegang fungsi stabilisasi yang berarti bahwa APBD merupakan tolak ukur keseimbangan perekonomian daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Pengelolaan Keuangan Daerah harus melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan realisasinya setiap tahun sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab. Hal tersebut harus dilakukan secara optimal dikarenakan banyak anggaran yang realisasinya tidak sesuai (Pavecta, 2018)

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan cara mengukur Efisiensi dan Efektivitas pencapaian sasaran dari program yang telah ditetapkan dalam satu periode. Menurut Halim (dalam Trianto, 2014) pengukuran Efektivitas dan Efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di suatu daerah berbeda-beda setiap tahunnya tergantung kondisi di daerah tersebut.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang terkena dampak Covid-19 pada Tahun 2019-2020. Namun pada tahun 2021 Kabupaten Lombok timur dapat dikatakan melewati fase pandemi dikarenakan perekonomian sudah mulai membaik. Dikatakan demikian karena Kabupaten Lombok Timur telah memasuki Zona Resiko Sedang dan PPKM level 2 yang artinya Angka kasus positif covid 20-50 per 100 ribu penduduk perminggu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021. Hal tersebut juga didukung oleh data yang diupload oleh Covid NTB bahwa Kasus suspek di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 orang dan pelaku perjalanan sebanyak 15 orang.

Pada kondisi tersebut pembelajaran tatap muka bisa dilakukan 50%, work from office maksimal 50%, pasar dan tempat pembelanjaan diizinkan untuk buka dengan protocol Kesehatan yang ketat, Dine in sudah diperbolehkan dengan maksimal pengunjung 50%, mall dan tempat ibadah dibuka maksimal 75% sebagaimana merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021. Hal tersebut cenderung mempengaruhi perekonomian masyarakat yang akan berpengaruh juga kepada Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan untuk lebih Efektif dan Efisien. Namun, di sisi lain menunjukkan kecenderungan Efektifitas dan Efisiensi yang menurun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengangkat judul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur Pada Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19".

## METODE

Berdasarkan Latar belakang dan tujuan pada penelitian ini. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan karakteristik populasi secara sistematis dan factual. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan Studi

Kepustakaan dan Dataset Statistik. Teknik Pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Teknik Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif dengan prosedur analisis rasio ektivitas dan rasio efisiensi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Target Penerimaan Asli Daerah

Target Penerimaan Asli Daerah adalah sasaran penerimaan murni atau pendapatan murni Kabupaten Lombok Timur yang telah ditentukan pada awal perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk satu Tahun dan dinyatakan dengan Rupiah. Data Target Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat di tabel 1.

**Tabel 1 Target Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur**

| Tahun | Target PAD (Rp)    |
|-------|--------------------|
| 2019  | 316.523.261.701,00 |
| 2020  | 363.232.243.349,00 |
| 2021  | 426.175.552.839,00 |

Sumber : Ringkasan perubahan APBD 2019-2021.

Dapat dilihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok timur tetap ditargetkan meningkat meskipun pada masa pandemi covid-19. Pada masa covid sebagian besar pajak ditargetkan menurun namun terdapat beberapa pajak dan retribusi yang ditargetkan meningkat seperti Pajak Reklame, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada Tahun 2019 sebesar Rp 316.523.261.701,00, lalu naik pada masa covid yaitu tahun 2020 menjadi Rp 363.232.243.349,00. Meskipun demikian persentase tercapainya target PAD Kabupaten Lombok Timur lebih tinggi di tahun 2019 sebesar 91,71% dan 2020 sebesar 90,33%.

Peningkatan target PAD tersebut dikarenakan adanya perkiraan pasca gempa 2018 dan tunggakan pajak di tahun 2019. Lalu pada tahun 2021 naik juga menjadi Rp 426.175.552.839,00 dengan serapan target naik menjadi 90,77% dikarenakan pada tahun 2021 keadaan ekonomi Kabupaten Lombok Timur

sudah mulai meningkat sehingga pemerintah Kembali menegaskan pajak dan retribusi yang ada.

### Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan asli daerah yang diterima Kabupaten Lombok Timur dan dinyatakan dengan rupiah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur antara lain Pendapatan Pajak, Pendapatan Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2

**Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur**

| Tahun | Pendapatan Asli Dearah (Rp) |
|-------|-----------------------------|
| 2019  | 289.621.500.124,36          |
| 2020  | 328.110.520.620,86          |
| 2021  | 386.846.220.594,00          |

Sumber : Laporan Target dan Realisasi APBD 2019-2021.

Dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok timur tetap naik meskipun pada masa pandemic covid-19. Pada Tahun 2019 sebesar Rp 289.621.500.124,36, lalu naik pada puncak covid yaitu tahun 2020 menjadi Rp. 328.110.520.620,86. Pengaruh terbesar dari meningkatnya PAD ini adalah optimaliasai pelayanan bidang Kesehatan. Meskipun

**Tabel 3 Persentase Perubahan PAD**

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | Persentase (%) |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|
| 2019  | 316.523.261.701,00 | 289.621.500.124,36 | 0              |
| 2020  | 363.232.243.349,00 | 328.110.520.620,86 | 13,2           |
| 2021  | 426.175.552.839,00 | 386.846.220.594,00 | 17,9           |

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa persentase perubahan PAD tahun 2019-2021 selalu mengalami kenaikan. Dimana dari tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 13,2% dan pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 17,9%. Meskipun pada

Pendapatan Asli Daerah ini mengalami kenaikan namun sebagian besar pajak daerah mengalami penurunan. Kenaikan PAD Kabupaten Lombok Timur ini disebabkan adanya kenaikan yang bersumber dari RS Dr. R. Soedjono Selong.

Dana untuk rumah sakit ini berasal dari pusat lanngsung namun hasil dari pelayanannya masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Perizinan tertentu. Selain itu adanya pembagian hasil deviden dari BUMD seperti Selaparang Finansial dan Bank NTB syariah yang masuk ke dalam Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun pada tahun 2021 yang sudah tergolong menjadi tahun pasca covid-19 naik menjadi Rp 386.846.220.594,00. Berbagai macam pajak sudah kembali stabil seperti semula namun ada beberapa yang menurun seperti Pajak Sarang Burung Walet dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan produksi dan daya beli masyarakat sudah mulai stabil.

### Persentase Perubahan PAD

Persentase perubahan Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil perbandingan yang dinyatakan dengan persen antara target Pendapatan Asli Daerah dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang kita tahu target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya berbeda-beda tergantung dengan kondisi atau keadaan suatu daerah pada tahun tersebut, begitupun yang terjadi di Daerah Kabupaten Lombok Timur. Adapun Persentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

tahun 2020 Kabupaten Lombok Timur terdampak Covid-19, namun OPD Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya meskipun pendapatan secara keseluruhan menurun. Hal ini terjadi karena

pada masa covid tahun 2020 ada beberapa pajak, retribusi dan pemasukan lainnya yang mengalami peningkatan seperti pajak reklame, retribusi perizinan tertentu, dan bagian laba atas penyertaan modal di BUMD. Beda halnya dengan tahun 2021 perekonomian sudah mulai membaik sehingga terjadi kenaikan di setiap pajak yang ada seperti pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain sebagainya yang mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur juga meningkat.

#### **Total Realisasi Pengeluaran**

Total Realisasi Pengeluaran adalah Jumlah belanja langsung Kabupaten Lombok Timur dengan belanja tidak langsung Kabupaten Lombok Timur selama satu tahun dan dinyatakan dengan Rupiah. Data Total Realisasi Pengeluaran atau belanja daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat di tabel 4

**Tabel 4 Total Realisasi Pengeluaran atau Belanja daerah Kabupaten Lombok Timur**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Pengeluaran (Rp)</b> |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>2019</b>  | 2.765.622.747.949,59              |
| <b>2020</b>  | 2.596.077.594.958,00              |
| <b>2021</b>  | 2.732.612.385.850,44              |

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2019-2021.

Tabel 4 menjelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Lombok Timur terjadi fluktuasi yaitu pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar Rp 169.545.152.991,59. Pengurangan ini meliputi pengurangan pada pos belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social, dan belanja keuangan pada kabupaten/ provinsi/ kota/ pemerintah desa/ parpol, dan mengalami kenaikan ada pos belanja tak terduga sebesar Rp 26, 618 M . Lalu pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 136.534.790.892,44. Realisasi belanja ini terjadi fluktuasi karena terjadi juga penurunan pada total pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan.

Belanja daerah pada awalnya di rencanakan sebesar Rp 2.663.762.000.000 lebih, lalu mengalami pengurangan kurang lebih sebesar Rp. 132.888.000.000 atau turun sebesar 4,75% dari anggaran sebelum perubahan. Komposisi perubahan APBD 2020

pada belanja tidak langsung sebesar Rp.1.516.581.000.000 lebih berkurang sebesar 3,49% dari jumlah sebelumnya yakni Rp. 1.578.710.000.000 dan belanja langsung berkurang sebesar 5,81% dari jumlah anggaran sebelumnya yakni Rp. 1.217.940.000.000. Pada masa covid-19 terjadi banyak refofusing anggaran, yaitu banyaknya pemotongan pagu untuk penyesuaian APBD Tahun 2020 yang salah satunya adalah Dana Aspirasi DPRD sebesar 50% atau sebesar 50 Miliar dari total kebutuhan Anggaran untuk penyesuaian sebesar 114 miliar.

Untuk penanganan Pandemi Covid 19 tahun 2019-2020 dimana prioritas yang diutamakan yaitu penanganan Kesehatan, Penanganan Ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial yang pada tahap pertama sebesar 34 Miliar, tahap kedua 73 Miliar dan tahap ketiga sebesar 5 Miliar sehingga totalnya sebesar 102 Miliar lebih dan laporan belanja tidak terduga dalam APBD tahun 2020 sebesar 18 Miliar. Sedangkan, pada tahun 2021 sekitar 180 Miliar dipangkas dari sektor non prioritas.

#### **Total Realisasi Pendapatan**

Total Realisasi Pendapatan adalah Jumlah Pendapatan asli Daerah Kabupaten Lombok timur, Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok timur, dan Lain-lain Pendapatan yang sah Kabupaten Lombok Timur yang dinyatakan dengan Rupiah. Data Total Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat di tabel .5

**Tabel 5 Total Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Timur**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Pendapatan (Rp)</b> |
|--------------|----------------------------------|
| <b>2019</b>  | 2.697.138.685.731,70             |
| <b>2020</b>  | 2.537.387.991.490,34             |
| <b>2021</b>  | 2.737.163.601.352,12             |

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2019-2021.

Tabel 5 menjelaskan bahwa total pendapatan atau penerimaan daerah Kabupaten Lombok Timur terjadi fluktuasi yaitu pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar Rp 159.750.694.241,36. Hal ini salah satunya dikarenakan Dana Alokasi Umum Daerah Lombok Timur dari total keseluruhan senilai 1,3 triliun rupiah

dipotong 115 milyar oleh Pemerintah Pusat. lebih lanjut pihaknya menyampaikan sisa anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja tidak langsung yakni seperti kebutuhan gaji pegawai. Adapun anggaran sebanyak 115 Milyar tersebut dirasa mampu menyedot penggunaan anggaran program yang lain.

Selain itu tingkat produksi masyarakat Kabupaten Lombok Timur menurun yang mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Lombok Timur juga ikut menurun sehingga pemasukan ke daerah juga ikut menurun. Pada rancangan APBD tahun 2020 terjadi perubahan rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 2.537.387.991.490,34 dan mengalami penurunan sebesar 5,52% dari yang sebelumnya sebesar Rp. 2.730.449.000.000. Lalu pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 199.775.609.861,78 yang disebabkan oleh perekonomian masyarakat yang sudah mulai stabil sehingga produksi masyarakat juga mengalami peningkatan yang mengakibatkan

meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat. Hal tersebut akan berdampak positif kepada pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

### Pembahasan Rasio Efektivitas

Seperti yang telah dibahas sebelumnya Efektivitas merupakan perbandingan antara target penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur yang diukur dengan rasio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui atau melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk Menyusun target PAD dan merealisasikannya. Semakin besar tingkat realisasi Penerimaan daerah di Kabupaten Lombok Timur dibandingkan dengan target penerimaan maka semakin tinggi nilai Efektivitas yang artinya semakin Efektif Pengelolaan Keuangan di daerah Lombok Timur. Adapun hasil dari Analisis Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 6

**Tabel 6 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021**

| Tahun | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | Tingkat Efektivitas (%) | Keterangan |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| 2019  | 316.523.261.701,00 | 289.621.500.124,36 | 91,5                    | Efektif    |
| 2020  | 363.232.243.349,00 | 328.110.520.620,86 | 90,3                    | Efektif    |
| 2021  | 426.175.552.839,00 | 386.846.220.594,00 | 90,7                    | Efektif    |

Sumber: Ringkasan perubahan APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2019-2021

Tabel 6 menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada masa covid-19 yaitu tahun 2019-2020 dan pasca Covid-19 yaitu tahun 2021 dapat dikatakan masih efektif dikarenakan rentang rasio setelah penghitungan data berkisar antara 90%-100%. Meskipun demikian terjadi penurunan efektifitas pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,2% dari 91,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% di tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan PAD di daerah Kabupaten Lombok Timur.

Oleh karena itu, kenaikan PAD tidak selalu menandakan suatu pengelolaan pendapatan di suatu daerah efektif. Namun, harus dibarengi dengan target yang sudah

ditetapkan di awal penyusunan APBD. Pada tahun 2021 perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Lombok Timur sudah mulai membaik sehingga terjadinya kenaikan Tingkat Efektivitas sebesar 0,5% dari 90,3% di tahun 2020 menjadi 90,7% di tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan mulai stabilnya perekonomian masyarakat sehingga penyerapan akan pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Selain itu kontribusi setiap OPD sangat berperan Penting dikarenakan pada tahun 2020 Bupati Kabupaten Lombok Timur meminta kepada Komite Investasi dan Tim Ekonomi Pemerintah Daerah menetapkan target minimal untuk diajukan kepada Pimpinan OPD.

### Pembahasan Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan alat untuk mengetahui

bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dapat mengoptimalkan perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah. Efisiensi di ukur dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Lombok Timur. Semakin besar Realisasi pengeluaran di Kabupaten Lombok

Timur di banding dengan realisasi penerimaan, maka semakin rendah tingkat Efisiensi yang artinya semakin tidak Efisien Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur begitu juga sebaliknya. Adapun hasil dari Analisis Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2021.**

| Tahun | Total Realisasi Belanja (Rp) | Total Realisasi Pendapatan (Rp) | Tingkat Efisiensi (%) | Keterangan     |
|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 2019  | 2.765.622.747.949,59         | 2.697.138.685.731,70            | 102,5                 | Tidak Efisien  |
| 2020  | 2.596.077.594.958,00         | 2.537.387.991.490,34            | 102,3                 | Tidak Efisien  |
| 2021  | 2.732.612.385.850,44         | 2.737.163.601.352,12            | 99,8                  | Kurang Efisien |

Sumber: Ringkasan perubahan APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2019-2021

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada masa covid-19 yaitu pada tahun 2019-2020 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur tergolong tinggi yaitu 102,5% dan 102,3% yang artinya Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur tidak efisien. Hal ini dikarenakan total realisasi belanja daerah Kabupaten Lombok Timur lebih besar daripada Pendapatan atau Penerimaan Kabupaten Lombok Timur. Pengeluaran di daerah Kabupaten Lombok Timur ini tinggi dikarenakan pada masa covid-19 terjadinya refocusing dan realokasi anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi pandemic ini. Anggaran senilai 172 milyar rupiah lebih dianggarkan untuk penanganan covid-19 di Lombok Timur. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Lombok Timur, Murnan. pihaknya menyampaikan untuk bantuan jaring pengaman sosial selama tiga bulan dianggarkan sebanyak 30 sampai 40 milyar.

Dengan pengeluaran yang banyak seharusnya diimbangi dengan pendapatan atau penerimaan di daerah Kabupaten Lombok timur. Namun seperti yang dipaparkan pada sub bab sebelumnya bahwa penyerapan penerimaan atau pendapatan pada masa Covid-19 tidak maksimal. Pasca covid-19 yaitu tahun 2021 Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur perekonomian mulai membaik yang mengakibatkan kenaikan status dari Tidak

Efisien menjadi Kurang Efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio tahun 2021 yaitu sebesar 99,8%. Meskipun hasil tersebut tergolong masih tinggi namun hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan dan peningkatan pada pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

## SIMPULAN

Berdasarkan Analisis yang telah dipaparkan bahwa rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur pada masa Covid-19 yaitu tahun 2019-2020 dan pasca Covid-19 yaitu tahun 2021 termasuk ke dalam kriteria Efektif yaitu pada range  $90\% \leq E < 100\%$ . Selanjutnya rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada masa covid-19 yaitu tahun 2019-2020 tergolong dalam kriteria Tidak Efisien yaitu pada range  $E \geq 100\%$ . Kemudian rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pasca Covid-19 yaitu tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi kriteria kurang efisien yaitu pada range  $90\% \leq E < 100\%$ .

## Deklarasi penulis

### Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

**Pendanaan**

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

**Ketersediaan data dan bahan**

Semua data tersedia dari penulis.

**Kepentingan yang bersaing**

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

**REFERENSI**

- Agoes, Sukirno. 2000. *Auditing*. Edisi kedua. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jilid I. Jakarta.
- Ani, P. N. L. . A. D. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 6. No. 3, 481-497.
- Araujo, M.D., Ni luh, P. W., Anom, P. 2018. Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Bagjana, I. F. (2020). *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Covid 19*.
- Batara, A., Nanik, M., Amir, H. 2022. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018*. JAN Maha. Vol. 4 No. 5.
- Bisma, I. D. G., Susanto, H. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. *Ganeç Swara Edisi Khusus*. Vol. 4 No.3
- Chih, C., Mao. 2021. *The Analysis Of The Regional Economic Growth And The Regional Financial Industry Development Difference In China Based On The Theil Index*. *International Journal Of Economics And Finance Studies*. Vol 13 No. 1.
- Devas, et al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Gorahe, I. A.M., Vecky, M., Daisy, E. 2013. *Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado*. Universitas Samratulangi Manado
- Gusnardi, Yesi, M, B,. 2021. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol. 4 No. 1: Hal 33-48.
- Habiburrahman, 2016. *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 6 No. 2 : Hal 120-134.
- Khusaini, M. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press.
- Kuswandi, A. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi : Penerbit Universitas Islam'45'.
- Latif, D,A., Dkk. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Asian Development Bank.
- Manopo, N., Debby, C,R., Sri, M., 2014. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Efisiensi Dan Efektifitas*, penerbit Andy Jakarta.
- Martanti, D, E., Eva, S, I., 2019. *Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar*. *Senmea Fakultas Ekonomi Un Pgrri Kediri*. UN PGRI Kediri.
- Nasir, M. S. 2019. *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol 2 No 1 : Hal 30-45.
- Nasir, M. A., Huynh, T. L. D., & Tram, H. T. X. (2019). *Role of financial development, economic growth & foreign direct investment in driving climate change: A case of emerging ASEAN*. *Journal of environmental management*, 242, Hal 131-14.
- Pavecta, N, T., Rizal, N., Subani, E. 2018. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2017*. *Progress Conference*. Vol.1, No. 1.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005*

- Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah RI. 2000. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah*. Jakarta.
- Randonowu, R., H., Jantje, J., T., Novi, B. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4 : Hal 23-32.
- Saknosiwi, Y, S., Josep, B, K., Krest, D, T. 2021. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 21 No. 03
- Saud, S., Chen, S., & Haseeb, A. (2019). *Impact of financial development and economic growth on environmental quality: an empirical analysis from Belt and Road Initiative (BRI) countries*. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(3), 2253-2269.
- Sitompul, Tiurma Rosmauli. 2018. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang*. Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan*. *Jurnal Emba*. Vol.1 No.3. Hal : 74-81.
- Tao, R., Fubing, S., Mingxing, L., Guangzhong, C. 2010. *Land Leasing and Local Public Finance in China's Regional Development: Evidence from Prefecture-level Cities*. *Urban Studies*.
- Trianto, Anton. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang*. Politeknik Darusalam Palembang.
- Widodo, S,T. (1999). *Pengantar Ekonomi Makro*. Penerbit Erlangga Jakarta